



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MA'RUF
2. Jabatan : KEPALA KPPN CURUP
3. NHK : 459584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	805.000.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/90 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	220.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOBIL, ISUZU PANTHER LM Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
5. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	80.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.791.304



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.112.291.304
III. HUTANG	Rp.	99.434.430
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.012.856.874

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.